

## **A. Pengantar**

Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris (1811-1816) oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles, sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di seluruh Jawa yang pada gilirannya bertanggungjawab membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah ini pada mulanya dapat dibayar dengan uang atau barang, tetapi selanjutnya pembayarannya menggunakan uang. Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan, dan dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati.

Kepada para petani, Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha melalui sistem sewa tanah tersebut. Kebijakan Gubernur Jenderal Stamford Raffles ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh semboyan revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai "*Libertie* (kebebasan), *Egalitie* (persamaan), dan *Franternitie* (persaudaraan)". Hal tersebut membuat sistem liberal diterapkan dalam sewa tanah, di mana unsur-unsur kerjasama dengan raja-raja dan para bupati mulai diminimalisir keberadaannya.

Hal tersebut berpengaruh pada perangkat pelaksana dalam sewa tanah. Gubernur Jenderal Stamford Raffles banyak memanfaatkan Raja, Bupati sampai kepala desa sebagai perangkat (struktur pelaksana) sewa tanah, dari pemungutan sampai pada pengadministrasian sewa tanah. Meskipun keberadaan dari para bupati sebagai pemungut pajak telah dihapuskan, namun sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian integral (struktur) dari pemerintahan kolonial, dengan melaksanakan proyek-proyek pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sistem sewa tanah yang diberlakukan ternyata memiliki kecenderungan tidak cocok bagi pertanahan milik penduduk pribumi hal ini terlihat upaya pemerintah kolonial untuk menyewakan

tanah pertanian bagi tanaman ekspor seperti kopi. Masyarakat Jawa pada abad ke-19 merupakan petani yang sangat sederhana. Kegiatan pertanian masih sangat murni ditangani oleh penduduk setempat serta untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Semua modal, tenaga kerja dan sarana-sarana lain disediakan oleh mereka sendiri. Dalam menanam dan memanen mereka memasarkan hasil pertanian, mereka menggunakan alat sederhana dan dibantu oleh tenaga hewan. Sewa tanah tersebut bagi rakyat sangat memberatkan.<sup>1</sup>

Pada tahun 1823 Gubernur Jenderal Van der Capellen memerintahkan agar tanah-tanah yang disewakan oleh kaum bangsawan dikembalikan lagi kepada yang punya, dengan perjanjian, bahwa uang sewa dan biaya lainnya harus dibayar kembali kepada penyewa. Dengan demikian beban para bangsawan juga sangat berat karena uang sewa sudah dibelanjakan.<sup>2</sup> Sawah Bedoyo yang terletak di Gunung Merapi, Joyo, dan Magetan dikembalikan kepada pemiliknya semula. Tetapi uang yang dibelanjakan untuk desa-desa itu semuanya diambil kembali dan hasilnya tidak sebanding dengan biaya-biayanya. Para pemilik tanah tidak kuat membayar pajak penguasa, untuk mengembalikan tanah-tanah itu selain itu banyak sekali rakyat biasa harus berpindah rumah.

Hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial, segala macam pajak dan kewajiban menjual hasil bumi kepada pemerintah kolonial dengan harga murah telah menyebabkan masyarakat menjadi makin miskin dan melarat. Sebaliknya penjajah menjual mimpi rakyat dalam bentuk perjudian, minuman keras, sabung ayam, pelacuran, serta racun demoralisasi lainnya. Penghancuran karakter masyarakat Jawa yang umumnya beragama Islam oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ini telah menggugah Pangeran Diponegoro dan seluruh keluarganya berjihad melawan penjajah. Kemarahan Pangeran Diponegoro tidak

---

<sup>1</sup> Anne Booth, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1988), hlm, 170.

<sup>2</sup> Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. (Yogyakarta: Universitas Sanatadarma. 2006), hlm 144.

dapat dibendung lagi hingga memerintahkan kepada pengikutnya untuk berkumpul di Tegalreja, yang terletak di sebelah barat 3 km dari Keraton Yogyakarta. Perang Pangeran Diponegoro pada awalnya berhasil merekrut 15 Pangeran dari 29 Pangeran dan 41 Bupati dari 88 Bupati yang ada dilingkup Mataram.<sup>3</sup>

### **B. Perang Diponegoro di Menoreh**

Sebelum Kabupaten Temanggung berdiri, pemerintah Hindia-Belanda membentuk Kabupaten Menoreh sebagai bagian dari Kedu yang berpusat di Menoreh. Sebagai Bupati yang pertama diangkatlah R. T. Ario Sumodilogo. Tugas pertamanya ialah membantu pasukan pemerintah Hindia-Belanda. Soemodilogo bahkan belum pula sempat menjalankan tugas sebagai bupati, karena Perang Jawa meletus. Dari sebelah utara pasukan-pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Cleerens mulai menyerang kesana, tempat yang menjadi pusat perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro. Seperti di daerah Telahap, Prapag, Muntung, dan daerah lainnya. Bahkan ada usulan oleh Resident Kedu untuk mempersenjatai orang-orang Tionghoa yang berpihak dan setia kepada Belanda.<sup>4</sup>

Pangeran Diponegoro mengirimkan surat dan beberapa utusan menuju Kedu, bahwa dalam surat tersebut Pangeran Diponegoro akan mengirimkan pasukan untuk mengusir musuh dan merebut kembali Parakan. Pasukan Belanda yang berpusat di Magelang, melakukan penyisiran dengan masuk desa yang berhubungan dengan perbatasan diwilayah Distrik Parakan. Pada tanggal 27 Juli

---

<sup>3</sup> Iwan Santosa, Legium Mangkunegaraan (1808-1942). *Tentara Jawa-Perancis Warisan Napoleon Bonaparte*. (PT. Kompas. Jakarta, 2011), hlm. 140-141.

<sup>4</sup> Sugimun, *Pahlawan Diponegoro. Bara Api Kemerdekaan nan Tak Kunjuang Padam*. (Dikeluarkan oleh Cabang bagian Bahasa/urusan adat-istiadat dan cerita rakyat jawatan kebudayaan Departeman P.P. dan K. 1960), hlm. 100-101.

1825 terjadi peperangan dipusat Kabupaten Menoreh. Pasukan Belanda memperkuat pertahanan agar Parakan tidak bisa direbut kembali.<sup>5</sup> Meski sebagai Bupati Menoreh, secara administratif R. Soemodilogo, tak mungkin berkedudukan di Menoreh, maka pemerintah Hindia-Belanda menempatkan Distrik Parakan sebagai ibu kota Kabupaten Menoreh sementara, agar tidak dapat diserang oleh pasukan Pangeran Diponegoro sebab tempat tersebut dijadikan markas besar pasukan Pangeran Diponegoro, akan tetapi terjadi pertempuran antara pasukan Diponegoro yang dipimpin Mas Rongga Prawiroyudo. Dalam pertempuran tersebut melawan pasukan Bupati Tumenggung Ario Soemodilogo, Soemodilogo merupakan jadi salah satu komandan pasukan “sekutu”, yang terdiri dari serdadu Belanda, Legiun Mangkunegaran, prajurit Kasunanan Solo, dan sejumlah Bupati prokompeni lainnya. “Batalyon” Soemodilogo berkedudukan di Parakan. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan pasukan Soemodilogo dengan dipenggalnya kepala Tumenggung Ario Soemodilogo oleh pasukan Diponegoro, yaitu Mertapati. Kemenangan pasukan Pangeran Diponegoro ini memberi pukulan yang hebat bagi Belanda.

Melihat kekalahan tersebut, pemerintah Hindia-Belanda, segera mencari pengantinya untuk mengisi pemerintahan di Kabupaten Menoreh. Melalui Besluit No. 11, tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Joyonegoro ditunjuk sebagai Bupati yang baru, dengan gelar Raden Tumenggung. Raden Tumenggung Ngabehi Joyonegoro mengusulkan kepada Residen Kedu C. I. Hartman untuk memindahkan pusat pemerintahan dan mengganti nama Kabupaten. Alasan Raden Ngabehi Joyonegoro adalah tempat yang sudah diserbu dan hancur oleh musuh harus ditinggalkan agar tempat yang baru dapat memberi kemakmuran dan kenyamanan bagi masyarakat. Kemudian Residen Kedu C. I. Hartman mengirim surat beserta usulan Bupati kepada pemerintah Hindia-Belanda di

---

<sup>5</sup> Sartono Kartodirjo, *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm, 129.

Batavia. Dalam surat tersebut Residen Kedu mengatakan “agar wilayah Probolinggo (Muntilan), dibawah asisten Residen Jacobus de Jongh Comerijk dipindahkan ke Temanggung, sebab diwilayah tersebut sudah tidak ada pemberontakan maka pemerintah tidak perlu khawatir. Untuk distrik Jetis, Prapak, Sumowono, Lempuyang masih jauh tertinggal dari Magelang dan Wonosobo, maka perlu ditempatkan seorang asisten Residen sebab masih ada gerombolan kecu”.<sup>6</sup> Pada tanggal 28 Oktober 1834 di Batavia Majelis Hindia Belanda telah menyetujui usulan tersebut dengan Surat Resolusi No. 4 yang dikeluarkan di Batavia pada tanggal 10 November 1834.

### **C. Temanggung Masa Tanam Paksa.**

Selama abad ke-19 kebijakan pemerintah Hindia-Belanda sangat erat berkaitan dengan politik dalam negeri, karena abad ke-19 merupakan awal yang buruk bagi pemerintah Hindia-Belanda, yaitu hutang semakin besar untuk menutup biaya Perang Belgia dan Perang Diponegoro. Oleh karena itu harus diusahakan agar di Temanggung, sesudah Perang Diponegoro, dilaksanakan kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Untuk itu, pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Temanggung pada bulan November 1834, untuk mendapatkan keuntungan dari pajak tanah, tenaga kerja, dan tanaman yang dapat di ekspor di pasar bebas.

Ciri utama dari Sistem Tanam Paksa yang diperkenalkan van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat untuk menyerahkan seperlima dari tanah yang dimiliki untuk ditanami tanaman yang diwajibkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sistem ini dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda dengan memanfaatkan wibawa dan pengaruh Bupati untuk mewajibkan penduduk

---

<sup>6</sup> Temanggung Tempo Dulu, *Serta Prospek di Masa Mendatang*. (Temanggung: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung, 1997), 24-25.

pribumi, untuk menanam tanaman yang dapat laku dipasar Eropa, dengan harga sepihak yang ditentukan oleh pemerintah. Setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari sistem ini.

Dalam Sistem Tanam Paksa, pemerintah Hindia-Belanda menentukan jenis tanaman yang harus ditanam di Kabupaten Temanggung. Jenis tanaman yang diutamakan ialah kopi dan tembakau. Untuk tenaga kerja dipakai dari petani. Untuk penanaman kopi, secara umum masih dapat dikerjakan di tanah yang belum digarap. Untuk penduduk, selain mengerjakan penanaman atas kebijakan yang diberlakukan, juga mempunyai tugas yang berat yaitu pengangkutan hasil tanam.<sup>7</sup>

Dengan dijalankannya Sistem Tanam paksa, maka Temanggung memasuki periode baru dalam politik kolonial. Sistem tersebut akan disesuaikan dengan adat kebiasaan pribumi yang telah ada. Ini berarti, bahwa kaum bangsawan feodal harus dikembalikan pada posisinya yang lama, sehingga pengaruh mereka dapat dipergunakan untuk menggerakkan rakyat, memperbesar produksi, dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diminta pemerintah.<sup>8</sup>

Selain harus bekerja bagi tanam paksa, rakyat juga masih berkewajiban melaksanakan kerja wajib. Ada tiga macam kerja wajib yang menjadi kewajiban rakyat, yakni kerja wajib untuk pemerintah kolonial, kerja wajib untuk pemerintah tradisional dan untuk desa. Kerja wajib untuk pemerintah misalnya pemeliharaan jalan, jembatan, mendirikan rumah untuk pegawai Eropa dan pegawai pribumi. Memang seluruh tenaga dan kesempatan rakyat diminta melaksanakan Tanam Paksa dan kerja wajib, sehingga untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial Penelusuran Kepustakaan Sejarah*,(Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 51-55.

<sup>8</sup> Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 13.

kebutuhan sendiri sudah tidak dapat lagi.<sup>9</sup> Pada masa Sistem Tanam Paksa di Kabupaten Temanggung berbagai tanaman-tanaman untuk dipasar dunia diselenggarakan. Diantaranya, kopi, tembakau. Disamping itu masih terdapat beberapa tanaman yang tak penting seperti lada, dan pohon-pohon morbei. Dalam perkembangannya tanaman kopi di Temanggung mengalami kenaikan, terlihat dari tahun 1833-1834, dari 64,236-75,000 per pikul.<sup>10</sup>

Akibatnya tak satupun ketentuan Tanam Paksa dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kepada penduduk tak pernah mengadakan perjanjian secara sukarela. Perjanjian hanya dilakukan dengan kepala desa. Para pegawai pemerintah Hindia-Belanda tak mau bersusah payah mengadakan perjanjian dengan para petani secara per orang, mereka lebih suka menetapkan target yang harus dicapai untuk masing-masing desa secara keseluruhan. Tanah yang diminta untuk kepentingan Tanam Paksa melebihi seperlima, bahkan separuh atau seluruhnya. Ini membuat rakyat semakin tertekan karena rakyat harus bekerja lebih dari 66 hari, dan ketentuan bahwa tanah untuk Tanam Paksa dibebaskan dari pajak tanah juga tidak dilaksanakan.<sup>11</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Melalui Sistem Tanam Paksa, pemerintah Hindia-Belanda memperoleh hasil yang besar dengan modal yang kecil. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada kepala-kepala setempat. Para petani harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tanaman pemerintah, sehingga tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya sendiri. Sehingga banyak rakyat sangat

---

<sup>9</sup> Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintah Hindia-Belanda*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 36-27.

<sup>10</sup> Kedu Algemeene Verslag 1834 no. 2/10. ANRI.

<sup>11</sup> Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia Jilid pertama*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1956), hlm. 166.

menderita, akibat tanam paksa yang diciptakan oleh Van den Bosch. Belanda memperoleh keuntungan besar, sedangkan keuangannya menjadi normal kembali. Pembangunan di negeri Belanda dibiayai dari hasil tanam paksa. Sebabnya pemerintah tidak melepaskan politik atas tanah jajahan. Keuntungan-keuntungan yang berasal dari perkebunan tetap dialirkan ke negeri Belanda dan tak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat untuk memperbaiki nasib kehidupannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip

Kedu Algemeene Verslag 1834 no. 2/10. ANRI.

##### Buku

Anne Booth, *Sejarah Ekonomi Indoenesia*, Jakarta: LP3S, 1988.

Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia Jilid pertama*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1956.

Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintah Hindia-Belanda*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Iwan Santosa, *Legium Mangkunegaraan (1808-1942). Tentara Jawa-Perancis Warisan Napoleon Bonaparte*, PT. Kompas. Jakarta, 2011.

Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Universitas Sanata darma, 2006.

Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah pergerakan Nasioanal Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

\_\_\_\_\_, *Bangsa Inlander: Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara*, Yogyakarta: LKIS, 2008.



Sugimun, *Pahlawan Diponegoro. Bara Api Kemerdekaan nan Tak Kunjuang Padam*. Dikeluarkan oleh Cabang bagian Bahasa/urusan adat-istiadat dan cerita rakyat jawatan kebudayaan Departemen P.P. dan K. 1960.

Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Temanggung Tempo Dulu, *Serta Prospek di Masa Mendatang*. Temanggung: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung, 1997.